

**KESENJANGAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA: FAKTOR
PENYEBAB DAN ARAH REFORMASI PENGENDALIAN MUTU**

Dian Annisa¹, Romi Faslah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Alamat e-mail: 1itsdianns.collage24@gmail.com, 2romi@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The gap in higher education quality in Indonesia persists due to disparities in human resources, differences in funding capacity, a weak culture of quality, and the implementation of a quality assurance system that tends to be administrative in nature. This study uses a descriptive qualitative method based on literature review by analyzing scientific journals, regulations, accreditation reports, and empirical studies to identify the factors causing the gap, the effectiveness of SPMI-SPME, and the direction of quality reform. The results show that the quality control system is not yet optimal because it is still predominantly compliance-based, while disparities in the quality of lecturers and infrastructure reinforce regional inequalities. The necessary reforms include decentralization of quality management, improvement of academic human resource competencies, equitable performance-based funding, and strengthening of outcome-based accreditation. A holistic, adaptive, and contextual approach to reform is considered capable of reducing quality gaps and strengthening the competitiveness of higher education nationally.

Keywords: Higher Education Quality, Quality Assurance System, Quality Reform

ABSTRAK

Kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih berlangsung akibat ketimpangan sumber daya manusia, perbedaan kapasitas pendanaan, lemahnya budaya mutu, serta implementasi sistem penjaminan mutu yang cenderung administratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis jurnal ilmiah, regulasi, laporan akreditasi, dan kajian empiris untuk mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan, efektivitas SPMI-SPME, dan arah reformasi mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu belum optimal karena masih dominan berbasis kepatuhan (compliance-based), sementara disparitas kualitas dosen dan infrastruktur memperkuat ketimpangan antarwilayah. Reformasi yang diperlukan mencakup desentralisasi pengelolaan mutu, peningkatan kompetensi SDM akademik, pendanaan berbasis kinerja yang berkeadilan, serta penguatan akreditasi berbasis capaian (outcome-based). Pendekatan reformasi yang holistik, adaptif, dan

kontekstual dinilai mampu menekan kesenjangan mutu dan memperkuat daya saing pendidikan tinggi secara nasional.

Kata Kunci: Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu, Reformasi Mutu

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan salah satu jenjang dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya inovasi, gagasan, serta solusi bagi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Selain itu, perguruan tinggi juga berfungsi sebagai kekuatan moral, pusat pembelajaran, serta agen perubahan sosial yang berkontribusi dalam mencetak generasi intelektual, peneliti, dan pembuat kebijakan yang berkompeten. Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan nasional. (Mesiono et al., 2024)

Kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia merupakan salah satu persoalan strategis yang berdampak langsung pada daya saing, relevansi lulusan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Perbedaan mutu antar perguruan tinggi semakin terlihat

melalui indikator akreditasi, kualitas dosen, kapasitas finansial, infrastruktur, hingga efektivitas implementasi sistem penjaminan mutu. Berbagai penelitian telah menyoroti isu ini, namun belum memberikan gambaran yang komprehensif terkait faktor penyebab serta arah reformasi pengendalian mutu yang diperlukan.

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan landasan penting dalam memahami kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya pada konteks pendidikan tinggi. Penelitian oleh Evi Kurniasari Purwaningrum (2025) menunjukkan bahwa kesenjangan mutu perguruan tinggi dipengaruhi oleh perbedaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, ketimpangan pendanaan, serta kebijakan pendidikan yang belum terdistribusi secara adil. Penelitian tersebut menekankan pentingnya reformasi pengendalian mutu melalui penguatan SPMI, peningkatan kapasitas SDM, serta pemerataan akses. Namun, penelitian ini belum mengkaji bagaimana faktor

teknis dan nonteknis (seperti budaya mutu, digitalisasi, serta partisipasi stakeholder) berinteraksi dalam menciptakan kesenjangan mutu antar perguruan tinggi. Sementara itu, penelitian oleh Riris Sira Torsina Sihombing (2022) memberikan gambaran makro terkait ketimpangan pendidikan di 34 provinsi, yang dipengaruhi secara signifikan oleh pendanaan dan infrastruktur. Meskipun relevan, studi ini tidak secara spesifik menyoroti konteks pendidikan tinggi dan belum membahas sistem pengendalian mutu internal seperti SPMI maupun evaluasi eksternal melalui SPME. Penelitian lain oleh Salamah Hujaimah dkk. (2023) juga mengidentifikasi faktor sosial-ekonomi, budaya, dan kebijakan publik sebagai penyebab ketimpangan pendidikan, namun masih bersifat umum dan belum mengaitkannya dengan mekanisme pengendalian mutu perguruan tinggi secara teknis.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun kesenjangan mutu pendidikan telah diteliti dari aspek infrastruktur, sosial-ekonomi, dan kebijakan, masih terdapat gap penelitian yang berkaitan

dengan integrasi faktor penyebab kesenjangan mutu dan relevansinya terhadap sistem pengendalian mutu pendidikan tinggi. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif hubungan antara faktor internal institusi, aspek kebijakan, dan efektivitas SPMI–SPME dalam memperkuat mutu perguruan tinggi. Selain itu, belum ada model reformasi pengendalian mutu yang bersifat holistik dan adaptif terhadap konteks Indonesia yang beragam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengarahkan fokus pada tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana menganalisis faktor-faktor penyebab kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, baik yang bersifat internal perguruan tinggi maupun eksternal seperti kebijakan, pendanaan, dan ketimpangan daerah. Kedua, bagaimana mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian mutu pendidikan tinggi—meliputi SPMI, SPME, serta tantangan kebijakan—dalam menjawab kesenjangan mutu yang terjadi. Ketiga, bagaimana merumuskan arah reformasi pengendalian mutu pendidikan tinggi yang relevan, adaptif, dan mampu mempersempit kesenjangan mutu

antar perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru berupa pengembangan model pengendalian mutu pendidikan tinggi yang integratif dan responsif terhadap tantangan pemerataan mutu di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam faktor-faktor penyebab kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia serta merumuskan arah reformasi pengendalian mutu berdasarkan hasil-hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang telah ada. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang dikumpulkan melalui penelusuran jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, buku akademik, dokumen resmi pemerintah, laporan BAN-PT dan LAM, serta sumber-sumber literatur lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan penelaahan sistematis terhadap berbagai artikel ilmiah menggunakan langkah-langkah pencarian literatur, seperti penentuan

kata kunci, seleksi jurnal sesuai kriteria inklusi, dan pencatatan temuan-temuan utama yang berkaitan dengan kesenjangan mutu dan pengendalian mutu pendidikan tinggi.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) yang meliputi proses identifikasi, reduksi, kategorisasi, dan sintesis data dari berbagai literatur. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi data penting yang terkait dengan faktor penyebab kesenjangan mutu, kelemahan pelaksanaan SPMI/SPME, serta rekomendasi kebijakan dalam berbagai penelitian. Data kemudian direduksi untuk memilih informasi yang paling relevan, diikuti dengan pengkodean untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema tertentu seperti sumber daya manusia, pendanaan, infrastruktur, kebijakan sentralistik, dan efektivitas sistem penjaminan mutu. Selanjutnya, temuan-temuan tersebut disintesis untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai akar masalah dan kebutuhan reformasi pengendalian mutu.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber literatur, yaitu

membandingkan hasil dari berbagai jurnal, laporan resmi, dan dokumen akademik untuk memperoleh konsistensi dan memperkuat validitas temuan. Penelitian ini sepenuhnya dilakukan melalui kajian literatur tanpa pengumpulan data lapangan, sehingga hasilnya berfokus pada analisis teoritis dan empiris dari penelitian terdahulu. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia serta memberikan rekomendasi reformasi pengendalian mutu yang relevan dan berbasis bukti ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Faktor Penyebab Kesenjangan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang sangat beragam. Perbedaan potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan kondisi geografis menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Wilayah yang berada di pusat pertumbuhan ekonomi—biasanya dekat ibu kota atau pusat pasar—

cenderung mengalami perkembangan yang lebih pesat. Sebaliknya, daerah terpencil dan jauh dari pusat kegiatan ekonomi berkembang lebih lambat. Ketimpangan ekonomi ini berdampak langsung pada ketimpangan layanan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, karena ketersediaan fasilitas, akses, dan dukungan pendanaan berbeda di tiap wilayah. (Panggarti et al., 2022)

Pada konteks perguruan tinggi, budaya mutu menjadi aspek fundamental untuk menjamin keberlanjutan kualitas pendidikan. Namun, implementasi budaya mutu di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meskipun SPMI telah diterapkan secara nasional, banyak perguruan tinggi belum mampu menginternalisasi nilai mutu dalam praktik akademik dan administratifnya. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen, pemahaman, dan kesadaran terhadap mutu belum merata. Keterbatasan sumber daya—baik infrastruktur, tenaga ahli, maupun dukungan finansial—menjadi hambatan utama terutama bagi perguruan tinggi yang berada di

wilayah tertinggal.(Ramadhan et al., 2025)

Keterbatasan ini diperburuk oleh tata kelola institusi yang belum optimal, lemahnya koordinasi antarunit, serta kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap tuntutan kompetensi abad ke-21. Kondisi tersebut menyebabkan perguruan tinggi di daerah tertentu kesulitan menjaga dan meningkatkan kualitas akademik, sehingga kesenjangan mutu antar wilayah semakin melebar.

Penelitian Banunu (2021) mengenai ketimpangan pendidikan di NTT menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan hanya terjadi di wilayah yang memiliki fasilitas memadai dan aktivitas ekonomi yang berkembang. Daerah terpencil masih menghadapi ketimpangan karena akses dan sarana pendidikan yang terbatas. Sementara itu, Handayani & Sukari (2025) menekankan bahwa biaya pendidikan yang tinggi menjadi penghalang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan berkualitas, sehingga kebijakan pendidikan perlu disesuaikan

dengan kondisi regional agar lebih inklusif.

Faktor infrastruktur pendidikan juga menjadi penyebab utama ketimpangan. Ayumningtyas (2021) serta Kurniawati (2022) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi akar keterbatasan akses. Penelitian Huraira dkk. (2024) menegaskan bahwa banyak sekolah dan perguruan tinggi di daerah tertinggal masih minim fasilitas akibat hambatan pendanaan, penyalahgunaan anggaran, lemahnya perawatan, dan kurangnya pengawasan. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas proses pembelajaran.

Minimnya pendanaan pendidikan semakin memperburuk kesenjangan mutu. Ketidakefisienan sistem, lemahnya pembiayaan, dan kurikulum yang tidak responsif berpotensi menghasilkan lulusan pendidikan tinggi yang kurang kompetitif di tingkat global. Kesenjangan ekonomi juga menyebabkan mahasiswa dari keluarga tidak

mampu semakin sulit masuk perguruan tinggi berkualitas. Komersialisasi pendidikan memperparah kondisi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Monica & Ravanti (2024) yang menemukan bahwa fleksibilitas penetapan UKT membuat banyak mahasiswa terbebani biaya tinggi. Dampaknya terlihat pada kasus 137 mahasiswa ITB yang hampir tidak dapat melanjutkan kuliah karena tunggakan UKT.

Aspek akreditasi juga mencerminkan kesenjangan mutu antar wilayah. Pemenuhan dokumen akreditasi sering kali membuat perguruan tinggi lebih fokus pada administrasi dibanding inovasi akademik. Kondisi ini menyebabkan perguruan tinggi tidak adaptif terhadap perubahan. Data Kemendikbudristek bahkan menunjukkan bahwa perguruan tinggi berakreditasi A masih didominasi oleh wilayah Jawa, sementara kawasan Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua, masih memiliki jumlah sangat minim. Ketimpangan capaian ini tidak hanya mencerminkan perbedaan kualitas, tetapi juga mempengaruhi persepsi publik dan

minat mahasiswa. Perguruan tinggi dengan akreditasi rendah cenderung kurang diminati, yang pada akhirnya berdampak pada jumlah mahasiswa, pendapatan institusi, kesempatan pengembangan dosen, dan kemampuan investasi infrastruktur (Romdloni et al., 2021).

Selain itu, ketersediaan dosen berkualitas turut menentukan mutu pendidikan. Perguruan tinggi di wilayah terpencil sering kali kekurangan tenaga pengajar yang kompeten, sehingga pemerataan mutu sulit tercapai. Kekurangan dosen ahli berdampak pada kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang pada akhirnya memperbesar jarak mutu antar perguruan tinggi di Indonesia. (Juventia & Yuan, 2024)

Secara keseluruhan, berbagai faktor tersebut—ketimpangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, budaya mutu yang belum kuat, komersialisasi pendidikan, minimnya pendanaan, serta ketimpangan distribusi dosen—saling berinteraksi dan memperkuat kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

2. Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi: SPMI, SPME, dan Tantangan Kebijakan

Sistem pengendalian mutu pendidikan tinggi di Indonesia dibangun atas dua kerangka utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah mekanisme penjaminan mutu yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh setiap perguruan tinggi secara mandiri untuk memastikan seluruh proses akademik, non-akademik, dan tata kelola berjalan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). SPMI beroperasi melalui siklus PPEPP—Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan—yang menekankan keberlanjutan proses perbaikan. Sementara itu, SPME merupakan mekanisme penjaminan mutu yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga akreditasi melalui siklus EPP—Evaluasi data, Penetapan status akreditasi, dan Pemantauan—untuk menilai kualitas institusi secara eksternal dan memberi

legitimasi terhadap mutu perguruan tinggi.(Fadhli, 2020)

Walaupun kerangka regulatif telah disusun secara komprehensif, implementasi kedua sistem tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural, teknis, dan kelembagaan. Variasi kapasitas perguruan tinggi menimbulkan kesenjangan yang signifikan dalam efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.

- a. Tantangan regulasi: sentralisasi standar dan minimnya fleksibilitas kebijakan

Salah satu persoalan krusial dalam implementasi sistem mutu adalah pendekatan kebijakan yang cenderung sentralistik. Regulasi seperti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 menetapkan standar minimal yang sama bagi seluruh perguruan tinggi, terlepas dari karakteristik institusional, kapasitas sumber daya, maupun konteks sosial ekonomi daerah. Meskipun bertujuan menjaga standar nasional, pendekatan ini sering kali tidak memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan mekanisme penjaminan mutu yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal.

Menurut pandangan Prof. Firman (UNP), sentralisasi standar menyebabkan berkurangnya otonomi akademik dan melemahkan partisipasi publik dalam tata kelola mutu. Perguruan tinggi yang memiliki keunggulan lokal atau kekhasan institusi merasa terbatas untuk melakukan inovasi mutu karena harus menyesuaikan seluruh proses dengan standar generik yang tidak selalu relevan. Pada akhirnya, sistem mutu yang seharusnya mendorong kreativitas dan diferensiasi justru menjadi faktor yang menyeragamkan praktik akademik, sehingga melambatkan proses adaptasi terhadap perubahan global.(Nuraeni et al., 2025)

b. Kesenjangan sumber daya dalam pelaksanaan SPMI dan SPME

Masalah terbesar dalam implementasi penjaminan mutu adalah ketimpangan kapasitas sumber daya antar perguruan tinggi, terutama antara perguruan tinggi besar dan kecil, negeri dan swasta, serta kota dan daerah tertinggal. Penelitian Widyastuti menunjukkan bahwa perguruan tinggi dengan keterbatasan dana,

teknologi, dan sumber daya manusia mengalami kesulitan memenuhi standar mutu yang mengharuskan dokumentasi sistematis, pengelolaan data berbasis digital, dan indikator kinerja yang kompleks.(Putra et al., 2025)

SPMI membutuhkan tenaga ahli penjaminan mutu, auditor internal, sistem pelaporan akademik, dan dukungan teknologi informasi. Namun, banyak perguruan tinggi di luar wilayah maju tidak memiliki unit penjaminan mutu yang memadai. Minimnya pelatihan staf dan lemahnya pemahaman terhadap konsep mutu menyebabkan implementasi PPEPP tidak berjalan secara utuh. Pada tahap evaluasi, misalnya, banyak institusi hanya melakukan audit internal secara administratif tanpa analisis mendalam terhadap akar permasalahan mutu.

Keterbatasan sumber daya juga tampak pada implementasi SPME. Proses akreditasi di Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) memerlukan biaya yang relatif tinggi, sehingga perguruan tinggi kecil menghadapi beban finansial yang signifikan. Kondisi ini tidak

hanya memengaruhi kemampuan institusi untuk mendapatkan peringkat akreditasi yang baik, tetapi juga memperdalam kesenjangan mutu antar perguruan tinggi di Indonesia.

c. Rendahnya komitmen kelembagaan dan budaya mutu

Efektivitas penjaminan mutu tidak hanya bergantung pada regulasi dan sumber daya, tetapi juga pada komitmen pimpinan dan budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi. Studi Sulaiman dan Wibowo (2016) menunjukkan bahwa rendahnya komitmen pimpinan di beberapa institusi, termasuk di universitas besar seperti UGM, berdampak pada lemahnya pelaksanaan SPMI. Banyak pimpinan perguruan tinggi merangkap tugas sebagai tenaga pengajar dan pejabat administratif, sehingga perhatian terhadap mutu menjadi terbagi.

Di sisi lain, budaya mutu belum sepenuhnya melekat pada sivitas akademika. Banyak dosen menganggap kegiatan penjaminan mutu sebagai beban administratif tambahan alih-alih sebagai proses refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Minimnya

literasi mutu menyebabkan resistensi terhadap perubahan, terutama ketika SPMI memasuki tahap evaluasi dan pengendalian yang membutuhkan keterbukaan terhadap kritik dan data.

d. Evaluasi dan Monitoring yang bersifat formalitas

Salah satu kritik terbesar terhadap implementasi sistem mutu adalah kecenderungan formalisasi proses evaluasi, terutama saat audit internal dan akreditasi. Temuan Hasanah mengungkapkan bahwa banyak perguruan tinggi melakukan evaluasi hanya untuk memenuhi persyaratan akreditasi, bukan sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi hasil audit sering kali tidak ditindaklanjuti secara sistematis, dan siklus PPEPP berhenti pada tahap evaluasi tanpa masuk ke tahap pengendalian dan peningkatan. (Nirmayanthi et al., 2023)

Kelemahan lainnya terlihat pada proses monitoring eksternal, di mana pemantauan pasca-akreditasi oleh lembaga akreditasi belum dilakukan secara intensif. Hal ini menyebabkan tidak adanya jaminan bahwa perguruan tinggi

mempertahankan kualitas setelah mendapatkan status akreditasi tertentu. Dengan demikian, sistem mutu kehilangan fungsi pengendalian jangka panjang yang menjadi esensinya.

e. Kesenjangan implementasi SPMI-SPME dan dampaknya terhadap mutu nasional

Keterbatasan sumber daya, komitmen kelembagaan, dan pendekatan kebijakan yang sentralistik secara bersama-sama menciptakan kesenjangan implementasi antara SPMI dan SPME. Perguruan tinggi besar mampu menjalankan kedua sistem secara integratif sehingga membentuk perbaikan mutu yang berkelanjutan. Sebaliknya, perguruan tinggi dengan kapasitas terbatas hanya menjalankan SPMI untuk memenuhi tuntutan akreditasi tanpa ada upaya peningkatan substansi.

Kesenjangan implementasi ini berkontribusi secara langsung terhadap ketimpangan mutu pendidikan tinggi secara nasional, khususnya dalam hal kualitas pembelajaran, kinerja dosen, fasilitas akademik, dan daya saing lulusan. Perguruan tinggi yang

menjalankan sistem mutu secara efektif cenderung menghasilkan lulusan lebih kompeten dan memiliki reputasi nasional/internasional yang lebih baik. Sebaliknya, perguruan tinggi yang kesulitan mengimplementasikan SPMI dan SPME secara komprehensif semakin tertinggal, memperkuat siklus disparitas mutu lintas wilayah.

Secara keseluruhan, sistem pengendalian mutu pendidikan tinggi di Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang kuat, namun realisasi implementasinya masih jauh dari optimal. Kesenjangan kapasitas kelembagaan, pendekatan kebijakan yang kurang adaptif, kelemahan budaya mutu, rendahnya komitmen pimpinan, serta kecenderungan formalisasi evaluasi menjadikan SPMI dan SPME belum mampu berfungsi sebagai instrumen transformasi kualitas. Karena itu, reformasi sistem mutu harus diarahkan pada diferensiasi kebijakan, penguatan kapasitas institusional, serta transformasi budaya mutu agar penjaminan mutu benar-benar

memberikan dampak substantif terhadap kualitas pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.

3. Arah reformasi pengendalian mutu pendidikan tinggi di Indonesia

Reformasi pengendalian mutu pendidikan tinggi di Indonesia memerlukan perubahan paradigma dari sistem yang sentralistik menuju pendekatan desentralistik yang memberikan ruang otonomi lebih luas kepada perguruan tinggi. Kebijakan desentralisasi ini sejalan dengan pandangan Tilaar (2006), yang menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan yang terdesentralisasi akan mendorong responsivitas institusi terhadap kebutuhan lokal serta meningkatkan efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk merancang mekanisme penjaminan mutu internal sesuai konteks sosial dan geografisnya, institusi dapat menghasilkan inovasi yang lebih relevan dan adaptif. Desentralisasi tidak hanya memperkuat kapasitas institusi dalam menjalankan SPMI, tetapi juga mengurangi beban

administratif akibat regulasi yang terlalu seragam, sehingga meningkatkan ruang gerak pembaruan akademik.

Selain itu, reformasi mutu menuntut adanya redistribusi dan peningkatan kapasitas SDM akademik sebagai fondasi utama kualitas perguruan tinggi. Menurut teori human capital Becker (1993), peningkatan kompetensi dosen akan berimplikasi langsung pada produktivitas institusi dan kualitas hasil pembelajaran. Namun, distribusi SDM berkualitas di Indonesia masih timpang, terutama antara perguruan tinggi besar di Jawa dan institusi kecil di kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, reformasi perlu mengembangkan kebijakan afirmatif, seperti capacity building, upskilling, serta kolaborasi lintas institusi, agar pengembangan profesional berkelanjutan dapat diakses secara merata. Dengan demikian, institusi yang sebelumnya tertinggal dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan.

Reformasi pendanaan juga menjadi aspek krusial, terutama

melalui pendanaan berbasis kinerja dan afirmasi bagi perguruan tinggi berkapasitas rendah. Pendanaan berbasis kinerja (performance-based funding) mendorong perguruan tinggi untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan capaian mutu (Lorensius et al., 2021). Namun, mekanisme ini harus diimbangi dengan skema afirmasi berupa bantuan khusus, peningkatan infrastruktur, dan dukungan operasional bagi perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan. Tanpa afirmasi, pendanaan berbasis kinerja berpotensi memperbesar kesenjangan karena institusi kuat semakin kuat, sementara institusi lemah tidak mampu memenuhi indikator kinerja. Oleh karena itu, reformasi pendanaan harus dirancang secara proporsional agar dapat mempersempit kesenjangan mutu secara nasional.

Dalam aspek sistem penjaminan mutu eksternal, reformasi menekankan pada penguatan akreditasi berbasis outcome dan audit mutu berkelanjutan. Pergeseran dari compliance-based menuju outcome-based accreditation

mengubah paradigma penilai mutu dari sekadar kelengkapan dokumen menuju penilaian atas hasil pembelajaran (learning outcomes), kualitas lulusan, dampak penelitian, serta kontribusi institusi terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Audit mutu berkelanjutan melalui siklus PPEPP juga harus dioptimalkan untuk mendorong institusi melakukan perbaikan berkesinambungan (continuous improvement). Pendekatan ini akan memperkuat budaya mutu internal dan memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya mengejar status akreditasi, tetapi benar-benar mengembangkan proses akademik yang berkualitas dan relevan. (Irma & Suparto, 2025)

Secara keseluruhan, reformasi pengendalian mutu pendidikan tinggi memerlukan pendekatan holistik, adaptif, dan kontekstual. Reformasi holistik berarti perubahan tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga manajemen institusi, tata kelola, digitalisasi, layanan kemahasiswaan, dan kolaborasi antarperguruan tinggi. Reformasi adaptif diperlukan untuk mengakomodasi keberagaman

karakter perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari PTN besar hingga PTS kecil dan perguruan tinggi di wilayah 3T. Sementara itu, reformasi kontekstual memastikan bahwa implementasi sistem mutu selaras dengan visi institusi serta kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya daerah. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini, arah reformasi pengendalian mutu akan mampu memperkecil kesenjangan mutu antar perguruan tinggi dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara nasional.

E. Kesimpulan

Kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor internal perguruan tinggi maupun faktor eksternal seperti kebijakan, pendanaan, kondisi geografis, dan kesenjangan infrastruktur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat bervariasi, dengan dominasi mutu tertinggi pada perguruan tinggi yang berada di wilayah maju, terutama Pulau Jawa. Kesenjangan tersebut diperkuat oleh

keterbatasan sumber daya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, lemahnya budaya mutu, komersialisasi pendidikan, serta disparitas akreditasi antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa disparitas mutu bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan kesenjangan struktural dan kelemahan tata kelola pendidikan tinggi yang belum mampu menjamin pemerataan kualitas secara nasional. Di sisi lain, implementasi SPMI dan SPME masih menghadapi berbagai hambatan, seperti pendekatan regulasi yang sentralistik, rendahnya komitmen kelembagaan, ketimpangan kapasitas institusi, serta kecenderungan formalisasi evaluasi yang menyebabkan siklus mutu belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan analisis sistem pengendalian mutu yang ada, reformasi pengendalian mutu pendidikan tinggi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkecil kesenjangan mutu dan mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Reformasi tersebut harus diarahkan pada desentralisasi kebijakan agar perguruan tinggi memiliki ruang inovasi sesuai konteks lokal; redistribusi dan peningkatan

kapasitas SDM akademik melalui pelatihan berkelanjutan dan kebijakan afirmatif; serta transformasi pendanaan berbasis kinerja yang tetap memberikan afirmasi bagi perguruan tinggi berkapasitas rendah. Selain itu, penguatan akreditasi berbasis outcome dan penerapan audit mutu berkelanjutan melalui PPEPP menjadi kunci dalam memastikan perbaikan mutu yang substantif dan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif. Dengan menerapkan reformasi yang bersifat holistik, adaptif, dan kontekstual, sistem pengendalian mutu pendidikan tinggi berpotensi membangun ekosistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif, kompetitif, dan merata di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan di Kalimantan Timur (Inequality of Access to Education in East Kalimantan). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129.
- Banunu, N. (2021). Ketimpangan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur: Evaluasi Kurva Kuznet dan Determinannya. *Jurnal Statistika Terapan (JSTAR)*, 1(1), 1–20.
<https://doi.org/10.5300/jstar.v1i1.9>
- Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 53–65.
<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148>
- Handayani, Y., & Sukari. (2025). Problematika Sistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 3(1), 168–179.
<https://doi.org/10.54066/jupendis.v3i1.2851>
- Hujaimah, S., Fadhilah, A. A., Fiqri, R., Sasmita, P., Salsabila, N., Mariani, M., Nugraha, D. M., & Santoso, G. (2023). Faktor, Penyebab, dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(06), 142–148.
- Irma, D., & Suparto. (2025). Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi: Kajian Kebijakan di Indonesia. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 513–520.
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1264>
- Juventia, D., & Yuan, S. A. (2024). Ketimpangan Sosial dalam Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 420–427.
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1–13.
<https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>
- Lorensius, Warman, & Tresia, Y.

- (2021). Kajian Literatur: Implementasi Performance-Based Budgeting Pada Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(1), 118–131. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.172>
- Mesiono, Wasiyem, Zakiah, N., Fahrezi, M., Nursikah, I., & Azhari, M. T. (2024). Dinamika Kepemimpinan Perguruan Tinggi: Tantangan dan Strategi Manajemen untuk Menanggapi Perubahan Cepat di Era Globalisasi. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3146–3153. <http://jiip.stkipyapisdompou.ac.id>
- Monica, S. Y. H., & Ravanti, N. F. P. (2024). Pelanggaran Hak atas Pendidikan di Indonesia: Diskursus mengenai Student Loan sebagai Solusi Komersialisasi Perguruan Tinggi. *Padjadjaran Law Review*, 12(2), 196–211. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1833>
- Nirmayanthi, A., Abdalla, M. A. F., Hasan, M., & Syamsudduha, S. (2023). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Cognoscere: Jurnal Komunikasi Dan Media Pendidikan*, 2(3), 116–125.
- Nuraeni, A., Lindasari, A., Rahmawati, R., Amalia, S. N. A., & Kholik, A. (2025). Analisis Transformasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Berdasarkan Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023. *Karimah Tauhid*, 4(6), 3756–3772. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.18275>
- Panggarti, U., Zumaeroh, Purnomo, S. D., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022). Studi Komparatif Ketimpangan Antar Pulau di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(2), 288–298. <https://doi.org/10.29264/jfor.v24i2.10988>
- Purwaningrum, E. K. (2025). Analisis Kesenjangan dan Rekomendasi Peningkatan Kualitas PendidikanTinggi. *JPM: Jurnal Pengembangan Mutu*, 1(1), 34–43.
- Putra, S. P., Juharis, M., Ramli, M., & Mardhiah. (2025). Peran, Tantangan dan Strategi Pusat Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. *Jurnal Mappesona*, 8(2), 55–65.
- Ramadhan, M. A., Setyaningsih, R., & Irawati. (2025). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kependidikan Islam*, 15(1), 23–34. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2025.15.1.23-33>
- Romdloni, M., Saiban, K., & Hazin, M. (2021). Problematika Pendidikan Tinggi, Kurikulum Dan Pendidik Di Indonesia. *Jurnal Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 116–125. <https://doi.org/10.35891/amb.v7i1.2939>
- Sihombing, R. (2022). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review (PEDR)*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i1>

2.6670

Sulaiman, A., & Wibowo, U. B.
(2016). Implementasi Sistem
Penjaminan Mutu Internal
Sebagai Upaya Meningkatkan
Mutu Pendidikan di Universitas
Gadjah Mada. *Jurnal
Akuntabilitas Manajemen
Pendidikan*, 4(1), 17–32.